

EKONOMI ISLAM MENJAWAB TANTANGAN GLOBAL (Dalam Perspektif Kebijakan Ekonomi Moneter)

*Agung Eko Purwana**

Abstrak: *Perekonomian dunia telah berusaha menyatukan dirinya dalam sebuah wadah tatanan ekonomi global. Namun upaya ini belum membuahkan hasil yang nyata bagi masyarakat di dunia. Justru globalisasi banyak menyebabkan ketimpangan, kesenjangan, perselisihan, dan peperangan mata uang global hingga memunculkan krisis ekonomi yang berkepanjangan pada negara-negara di dunia. Lebih ironis lagi, ternyata negara-negara yang menjadi korban krisis ekonomi justru penduduk mayoritas muslim. Permasalahan yang muncul adalah sejauh mana ajaran Islam dengan konsep ekonomi Islamnya ini mampu memberikan solusi dalam mengatasi berbagai masalah keuangan dunia pada khususnya, dan perekonomian dunia pada umumnya. Dilihat dari sejarahnya, umat Islam pernah memiliki masa kejayaannya dalam mengelola ekonomi dunia. Oleh karenanya, potensi ini menjadi penyemangat untuk kembali bangkit memimpin ekonomi dunia, di samping memang ajaran Islam menuntut yang demikian pula. Dalam penulisan ini, penulis berharap dapat menggali ide dan gagasan agar dapat terungkap berbagai cara atau solusi untuk mengatasi masalah keuangan dan ekonomi dunia. Namun karena umat Islam yang jumlahnya banyak dan tersebar di seantero dunia maka menjadi tantangan sendiri untuk bisa mewujudkannya. Tahapan dalam setiap negara akan berbeda dalam memberikan pengarahan kepada pemerintah dan masyarakatnya.*

Kata Kunci : *Manusia, Peraturan, Ketaatan, Tujuan.*

PENDAHULUAN

Benua Eropa telah disatukan oleh mata uang yang sama. Negara-negara Eropa telah menyepakati menggunakan mata uang *euro* untuk transaksi di negaranya maupun antar negara mereka. Mata uang bersama ini telah menggantikan peran dari *poundstarling*, *gulden*, *francdeuchark*, *lira*, dan sebagainya. Berbagai kemudahan dalam melaksanakan berbagai transaksi telah dinikmati oleh pemerintah maupun masyarakatnya.

Pada perkembangannya mata uang *euro* telah menjadi alternatif dan kekuatan penyeimbang bagi negara-negara di dunia atas dominasi mata uang *dollar* Amerika Serikat. Disamping mata uang *euro* Eropa yang berpotensi mendunia, juga terdapat mata uang *yen* Jepang dan mata uang *yuan* Cina. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka saling berebut pengaruh hingga terjadi peperangan, perselisihan, dan persengketaan mata uang yang berakibat pada ketidakseimbangan ekonomi global.¹

Tak dapat disangkal, proses penyatuan berbagai mata uang negara-negara Islam tidak mudah. Namun berangkat dari kondisi obyektif atas kerugian material akibat takluk pada dominasi mata uang tertentu di dunia ini, maka apa yang dilakukan masyarakat Eropa layak dicontoh. Dalam kaitan ini, negara-negara Islam punya alternatif mata uang yang cukup strategis karena nilai historikalnya, disamping keunggulan komparatif-obyektifnya. Dinar yang telah diberlakukan sejak masa Rasulullah, dan bahan baku logam mulia itulah jenis mata uang yang tampaknya sesuai untuk negara-negara Islam.²

¹ Agung Budiono, "IMF Gagal Cegah Perang Mata Uang", dalam *Republika* (11 Oktober 2010), 13.

² Ahmad Muflih Saefuddin, Regionalisasi Mata Uang Dinar dalam *Dinar Emas Solusi Krisis Moneter* (Jakarta: PIRAC, SEM Institute, Infid, 2001), xii.

Penduduk Negara-negara Eropa relatif tidak mempunyai jumlah yang banyak. Hal ini berbeda dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, mereka jumlahnya besar dan tersebar dalam berbagai negara besar maupun kecil. Namun demikian, fakta ini tidak boleh menyurutkan semangat untuk memberlakukan mata uang bersama atau pemersatu untuk negeri-negeri muslim. Hal ini terjadi karena secara prediktif perkembangan mata uang masyarakat eropa tersebut tidak akan banyak memberikan kontribusi positif bagi kepentingan moneter negeri-negeri yang mayoritas penduduknya muslim.

Berbagai hal pada fenomena mata uang di atas harus dapat diubah menjadi peluang yang justru dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat. Penduduk yang besar dan negara-negara yang tersebar di seluruh penjuru dunia adalah peluang dan tantangan bagi umat Islam untuk memainkan peranannya dalam rangka mencapai kesejahteraan dan perdamaian dunia.

Tulisan ini bermaksud mengungkap potensi-potensi yang dimiliki oleh umat Islam dan ajaran Islamnya dalam bidang moneter untuk mewujudkan tujuan-tujuan ekonomi Islam. Diharapkan tulisan ini akan memberikan sumbangan pemikiran atau gagasan yang dapat digunakan oleh umat Islam dalam memperbaiki masyarakat dan negaranya agar sampai kepada cita-cita bersama, yakni Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam.

GLOBALISASI EKONOMI

Perekonomian dunia pada saat ini tidak lagi didominasi oleh hanya peran Negara dan pemerintahannya, tetapi oleh kalangan swasta besar yang bekerja tidak hanya pada suatu Negara. Kelompok ini dapat menembus Negara dan bangsa yang mana saja. Mereka ini tidak lain adalah pemodal besar yang merupakan generasi penerus dari kapitalisme negara

yang berkembang pasca kemerdekaan negara-negara di dunia. Batas-batas nasionalisme ditelan ideologi yang menamakan dirinya globalisasi.

Globalisasi ekonomi muncul sejak ditandatanganinya kesepakatan *The Bretton Woods* di Amerika Serikat yang memunculkan gagasan pendirian IMF, Bank Dunia, dan GATT. Aktor dibalik peristiwa ini adalah perusahaan-perusahaan transnasional (TNCs) yang berusaha mengintegrasikan ekonomi nasional menjadi ekonomi global. Kesepakatan ini telah berhasil memaksakan reformasi kebijakan nasional dalam berbagai bidang dengan tujuan untuk memudahkan perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi dengan mendapatkan perlindungan.³

Menghadapi krisis finansial global yang terjadi akhir-akhir ini, respon revisionistik terus dilakukan oleh libertarians, diantaranya adalah negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-7 dengan cara memikirkan sebuah arsitektur baru dalam sistem finansial global (*the new architecture of global financial system*). Padahal menurut beberapa pemikir radikal, penyebab keruntuhan ekonomi Asia, dan tergoncangnya sistem keuangan global adalah kekeliruan yang bersifat mendasar (menyangkut ideologi dan paradigma dasar ekonomi). Sehingga mengatasi krisis global menjadi tidak ada artinya tanpa mengubah ideologi dan paradigma ekonominya.⁴

Dampak positif dan negatif telah terjadi di berbagai negara di dunia. Negara dan pemerintah masing-masing telah berusaha untuk melindungi rakyatnya dari dampak negatif globalisasi. Dan secara maksimal berusaha untuk

³ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* (yogyakarta : Insist Press dan Pustaka Pelajar, 2003), 219-220.

⁴ A. Prasetyantoko, *Arsitektur Baru Ekonomi Global Belajar dari Keruntuhan Ekonomi Asia Tenggara* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2010), viii.

mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari pengaruh globalisasi ini. Mereka ada yang berhasil dan ada juga yang gagal. Kegagalan inilah yang menjadi penyebab dari terjadinya krisis ekonomi yang terjadi pada negara-negara yang *notabene*-nya berpenduduk muslim. Krisis ini pada mulanya bermula karena telah terjadi kesalahan dalam mengelola keuangan. Kebijakan moneter dalam suatu negara tidak lagi hanya dipengaruhi oleh keadaan dalam negeri saja tetapi juga faktor dari kondisi di luar negeri. Bahkan akan menjadi besar pengaruhnya bila suatu negara itu sangat tergantung sekali perekonomiannya kepada luar negeri.

Salah satu jalan yang ditempuh untuk menciptakan ketergantungan ideologis adalah dengan memberikan pinjaman berupa utang luar negeri bagi negara-negara yang porak poranda perekonomiannya akibat perang dunia. Program *Marshall Plan* menjadi kelinci percobaan yang ternyata berhasil dengan gemilang, sehingga sangat beralasan untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai instrumen politik dalam mengikis kekuatan sosialisme Soviet.³

Kegagalan perekonomian global dengan prinsip pasar bebasnya telah terbukti menemui jalan buntu sehingga ideologi ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Fenomena ini telah menjadi legitimasi perlawanan ideologis terhadap sebuah sistem yang sekarang diakui keabsahannya di seluruh dunia. Perlawanan ini terwujud dalam sebuah kritik tajam terhadap fenomena krisis perekonomian global, yakni pernyataan bahwa sistem pasar bebas telah diselewengkan dengan penyelenggaraan sistem ekonomi yang spekulatif. Sistem ekonomi yang berstandar emas diganti dengan peraturan yang mana keuntungan dan kerugian hanya ditentukan oleh persoalan nasib belaka. Perekonomian riil

³ *Ibid.*, 43.

telah digantikan oleh perekonomian yang menekankan pada fungsi uang sebagai alat untuk melakukan spekulasi.⁶

Pada akhirnya globalisasi tidak lagi dapat dihindari oleh seluruh negara-negara di dunia termasuk negeri-negeri yang mayoritas penduduknya umat Islam. Oleh karenanya umat Islam dengan ajarannya yang juga bersifat global memiliki potensi besar untuk mengambil peran dalam mengelola kebijakan moneter di negaranya agar dapat mencegah keguncangan dan meraih kestabilan. Bahkan umat Islam menjadi harapan besar memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan negara dan masyarakatnya.

KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter adalah tugas dan kewajiban dari pemerintah dalam suatu negara untuk mengatur dan mengelola mata uang dan peredarannya. Berbagai transaksi dalam sebuah negara akan berjalan dengan lancar dan akan membantu mempermudah mencapai tujuan-tujuan bila negara benar dalam mengelolanya. Sebaliknya akan menjadi kacau bahkan timbul krisis moneter bila tidak diatur dengan benar. Pada akhirnya masyarakat tidak akan lagi percaya kepada mata uang yang dipergunakannya, karena tidak ada lagi yang dipakai sebagai dasar, patokan, atau pedoman dalam berdagang dan bertransaksi di antara mereka.

Ilmu moneter dan fiskal adalah bidang kajian ilmu ekonomi moneter. Ilmu ekonomi moneter adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat serta pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi pada umumnya diartikan sebagai suatu kegiatan yang mempengaruhi tingkat pengangguran, produksi, harga, dan hubungan perdagangan atau pembayaran internasional.⁷

⁶ *Ibid.*, 3.

⁷ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam* (Jakarta : Salemba Empat, 2002), 8.

Pada konsep dasarnya, uang memiliki fungsi sebagai minyak pelumas dalam menggerakkan kegiatan perekonomian. Pada masa awalnya, uang berupa suatu komoditi, namun dalam perkembangannya fungsi uang digantikan oleh uang kartal dan uang giral. Tidak seperti halnya barang-barang ekonomi yang lain, uang dinilai sebagai sesuatu yang berharga bukan atas kegunaan langsungnya tetapi terletak pada kegunaan secara tidak langsung, yakni kemampuan atas apa yang dibelinya.

Pada masa modern saat ini, masyarakat tidak memperdulikan uang yang digunakannya, baik itu uang kartal, uang giral, atau dalam bentuk sertifikat lainnya. Masyarakat memandang yang penting adalah uang itu dapat dipertukarkan dengan kebutuhan akan barang yang diperlukannya. Padahal uang tersebut akan ada nilainya bila yang beredar terbatas jumlahnya.

Di negeri-negeri yang kurang maju atau negeri-negeri terbelakang (*underdeveloped countries*) atau negeri-negeri sedang berkembang (*developing countries*), uang kartal lebih banyak beredar daripada uang giral. Sebaliknya di negeri-negeri maju (*developed countries*), uang giral lah yang lebih banyak beredar di dalam masyarakat daripada uang kartal.⁸

Peredaran jumlah uang yang terbatas merupakan kondisi penting apabila uang tersebut dikehendaki untuk tetap ada nilainya. Apabila uang yang beredar tidak terbatas sehingga praktis menjadi barang bebas, maka orang akan memiliki jumlah yang banyak untuk dibelanjakan. Akibatnya adalah pada harga-harga, tingkat upah, dan pendapatan meningkat sangat tinggi. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang pada akhirnya memberikan wewenang kepada

⁸ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2000), 72-73.

pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar.⁹

Aliran monetarisme memandang bahwa peranan uang adalah titik sentral dalam memahami berkembangnya makro ekonomi dari waktu ke waktu. Jumlah uang yang beredar menurut sudut pandang pemikiran ini merupakan unsur utama pertumbuhan jangka pendek GNP nominal. Sedangkan dalam jangka panjang, uang adalah unsur utama yang menentukan harga. Konsekuensi aliran monetarisme dalam pemikiran ini adalah pemerintah harus menolak campur tangan dalam kegiatan ekonomi melalui penetapan undang-undang, pasar, dan upah.¹⁰

Aliran Keynesian memandang berbeda dengan aliran monetarisme. Dalam pandangan ini menyatakan bahwa kebijakan moneter pada umumnya adalah tindakan pemerintah (atau Bank Sentral) untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui pasar uang. Sedangkan secara lebih khusus, kebijakan moneter dapat diartikan sebagai tindakan makro pemerintah (Bank Sentral) dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang beredar. Selanjutnya penciptaan jumlah uang beredar oleh pemerintah ini bisa mempengaruhi tingkat bunga yang berlaku di pasar. Melalui mata rantai pada tingkat suku bunga, pemerintah bisa mempengaruhi pengeluaran investasi (I), dan selanjutnya permintaan agregate (Z), dan akhirnya tingkat harga (P) dan GDP riil (Q).¹¹

⁹ Paul A. Samuelson dan Williams D. Nordaus, *Ekonomi*, Jilid I, terj. Jaka Wasana (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1989), 353.

¹⁰ *Ibid.*, 426.

¹¹ Boediono, *Ekonomi Makro* (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 1990), 96.

Inflasi mengandung implikasi bahwa uang tidak dapat berfungsi sebagai satuan hitungan yang adil dan benar. Hal ini menyebabkan uang menjadi standar pembayaran tertunda yang tidak adil dan alat penyimpan nilai yang dapat dipercaya. Inflasi menyebabkan orang berlaku tidak adil terhadap orang lain, meskipun tidak disadarinya, dengan memerosotkan daya beli aset-aset moneter secara tidak diketahui. Hal ini merusak efisiensi sistem moneter dan menimbulkan ongkos kesejahteraan pada masyarakat. Hal itu meningkatkan konsumsi dan mengurangi tabungan. Inflasi memperburuk iklim ketidakpastian dimana keputusan-keputusan ekonomi diambil, menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran pada formasi modal dan menyebabkan misalokasi sumber-sumber daya. Ia cenderung merusak nilai-nilai, memberikan imbalan kepada usaha-usaha spekulasi (yang tidak disukai Islam). Dengan menimpakan kerugian pada aktivitas-aktivitas produktif (yang digalakkan Islam) dan memperparah ketidakmerataan pendapatan (yang dikutuk Islam).¹²

Kebijakan moneter juga memepertimbangkan hal-hal yang menyebabkan kestabilan nilai mata uang. Kebijakan moneter juga mengelola dampak terhadap berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan. Pemerintah juga berkewajiban mengawasi berbagai hal yang berkaitan erat dengan masalah-masalah moneter, misalnya : suku bunga, inflasi, nilai tukar, investasi, masalah kurs mata uang dan sebagainya.

EKONOMI ISLAM

Ajaran Islam adalah keyakinan universal yang didasarkan pada persatuan tauhid yang mudah dipahami

¹² *Ibid.*, 5.

dan diamalkan oleh umat manusia. Islam mengajarkan manusia dengan etika yang menempatkan kecukupan materi hanya sebagai alat, bukan tujuan. Islam juga menawarkan suatu sistem ekonomi yang mewajibkan penggunaan sumber daya yang diberikan Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar manusia dan menyediakan mereka kondisi kehidupan yang layak. Oleh karenanya dalam pandangan ini, kekayaan adalah amanah dari Tuhan yang penggunaannya harus dilakukan secara benar.

Uang dan harta kekayaan lainnya yang diakui oleh manusia hanyalah amanah, yang dipercayakan kepada manusia agar menyadari akan tujuan Tuhan. Tujuan tersebut adalah mewujudkan kebaikan hidup manusia dan merealisasikan keadilan sosial ekonomi bagi masyarakatnya. Implikasi paham ekonomi Islam ini adalah mengajarkan kepada umatnya agar mewujudkan perekonomian yang memenuhi kebutuhan semua orang, pembagian pendapatan dan kekayaan yang adil, pemberian kesempatan kerja penuh, tidak ada eksploitasi terhadap sesama, dan adanya perlindungan terhadap alam sekitarnya. Ekonomi Islam juga menghendaki semua kegiatan perekonomian dijalankan dengan prinsip kemanfaatan dan meninggalkan semua yang membawa kerusakan dengan menyeimbangkan aspek dunia dan akhirat.

Ekonomi Islam merupakan kegiatan ekonomi yang mengakui keberadaan mekanisme pasar. Namun Ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip yang harus ditaati dan dipenuhi unsur-unsurnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah :¹³

1. Kebebasan individu;
2. Hak dan kepemilikan terhadap harta;

¹³ Muhammad Nalik HR, *Benarkah Bunga Haram, Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil & Dampaknya pada Perekonomian* (Surabaya : Amanah, 2009), 64.

3. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar;
4. Keseimbangan dan kesederhanaan;
5. Jaminan sosial;
6. Distribusi kekayaan;
7. Larangan menumpuk dan menimbun harta;
8. Efisiensi;
9. Kesejahteraan individu dan masyarakat.

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas, ekonomi Islam telah memberikan rambu-rambu dalam pengaturan masalah keuangan. Uang dan lembaga keuangannya memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi disebabkan dengan pengaturan uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut dapat dicapai cita-cita keadilan. Keadilan ini tentunya tidak berimplikasi hanya masalah keuangan negara tetapi keadilan pada tingkat sosial masyarakatnya juga.

Pengelolaan uang yang benar akan dapat mewujudkan kestabilan perekonomian. Kestabilan perekonomian menjadi sesuatu tujuan yang amat penting dalam ekonomi Islam. Dalam masalah moneter, kestabilan ini berwujud tidak adanya kelebihan permintaan dan penawaran uang. Oleh karenanya untuk menjaga kestabilan ini, beberapa hal telah dilarang dalam ekonomi Islam. Larangan tersebut adalah :¹⁴

1. Permintaan yang tidak riil. Permintaan uang hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga;
2. Penimbunan mata uang. Menimbun uang sebagaimana yang dilarang dalam al Qur'an surat At Taubah : 34 -35)
3. Transaksi *talaqqi rukban*. Mencegat penjual dari kampung di luar kota untuk mendapat keuntungan dari ketidakta-huan harga. Distorsi harga ini merupakan cikal bakal spekulasi;

¹⁴ Adiwartman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 29.

4. Transaksi kali bi kali. Bukan transaksi tidak tunai. Transaksi tunai diperbolehkan, namun transaksi masa depan (*future*) tanpa ada barangnya dilarang. Transaksi maya ini merupakan pintu riba.
5. Segala bentuk riba. Sebagaimana dilarangnya dalam al Qur'an surat Al Baqarah : 278

Larangan-larangan di atas memberikan penjelasan bahwa ekonomi Islam sesungguhnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mengutamakan stabilitas. Sedangkan perbedaan yang mendasar dengan ekonomi konvensional adalah tidak digunakannya instrumen bunga, tidak melakukan ekspansi moneter melalui pencetakan uang baru, dan tidak mengambil kebijakan defisit anggaran. Ekonomi Islam melakukan percepatan terhadap uang dan pembangunan infrastruktur yang riil.

Seorang pengusaha yang tertekan dengan sistem bunga akan dipaksa untuk berpikir dan bertindak dalam bingkai pengembalian utang secepat mungkin. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka akan semakin besar intensitas tekanan itu. Oleh karenanya, dalam skala yang lebih besar akan memunculkan eksploitasi sumber daya alam yang besar untuk memenuhi tuntutan sistem ekonomi berbasis bunga tersebut.¹⁵

Bunga dapat diartikan sebagai kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman yang diterima kreditur atau tabungan secara kondisional dalam hubungannya dengan waktu yang ditentukan. Hal itu mengandung tiga unsur : (1) Kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman, (2) penetapan kelebihan ini berhubungan dengan waktu, dan

¹⁵ Mulyawan, *Argumentasi Sains atas Bahaya Riba* (Bandung : Syamil Cipta Media, 2002), vi.

(3) transaksi yang menjadi syarat pembayaran kelebihan tersebut. Ketiga unsur ini bersama-sama membentuk riba.¹⁶

Setelah menjadikan sembilan pendapat ulama sebagai landasan untuk mengambil keputusan hukum, Komisi fatwa MUI berkesimpulan bahwa bunga yang berlaku dalam sistem perbankan konvensional lebih buruk dari riba yang diharamkan dalam al Qur'an, karena riba yang ditetapkan dalam al Qur'an hanya dikenakan pada peminjam ketika ia tidak mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah disepakati, sedangkan bunga bank sudah langsung diberlakukan kepada peminjam sejak terjadi transaksi.¹⁷

Selain larangan-larangan kegiatan tersebut diatas, ajaran Islam juga mendorong percepatan perputaran uang dengan menganjurkan umatnya untuk sedekah, zakat, pinjaman kebaikan (*qard*), kerjasama bisnis (*shirkah*), dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan dalam bentuk kerjasama ini akan memberikan keuntungan bersama, baik bagi pelaku usaha maupun penyandang dana. Mereka sama-sama mendapatkan pengalaman, informasi, metode supervisi, dan manajemen risiko suatu usaha. Pada akhirnya berbagai informasi ini akan menurunkan tingkat risiko investasi suatu usaha. Dengan kata lain kebijakan moneter ekonomi Islam ini akan selalu terkait dengan sektor riil perekonomian, sehingga hasilnya adalah pertumbuhan dan sekaligus stabilitas perekonomian.

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep ekonomi konvensional. Menurut ekonomi Islam, uang tidak identik dengan modal, uang adalah *public goods*, modal adalah *private goods*, uang adalah *flow concept*, modal adalah

¹⁶ Nafik HR, *Besar-kah*, 90.

¹⁷ Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), 38.

stock concept. Menurut ekonomi konvensional, uang sering diidentikkan dengan modal, uang adalah *private goods*, modal adalah *private goods*, uang maupun modal adalah *stock concept*.¹⁸

Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam berupa sebuah konsep yang mencakup bagaimana negara mengatur dan mengelola sumber-sumber pendapatannya dan sekaligus memberikan petunjuk dan pengarahan dalam masalah penyalurannya. Semua komponen akan terintegrasi dalam kebijakan ini sehingga tidak ada yang bergerak secara sendiri-sendiri. Di tingkat penguasa, mulai dari paling tinggi sampai yang terendah akan turut serta dalam menyukseskan setiap kebijakan.

Dalam ekonomi Islam, pengelolaan uang dan lembaga keuangan harus memiliki karakteristik sebagaimana yang dijelaskan berikut ini :¹⁹

1. Kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal;
2. Keadilan sosio ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata;
3. Stabilitas nilai mata uang untuk memungkinkan alat tukar sebagai satuan unit yang dapat diandalkan, standar yang adil bagi pembayaran yang ditangguhkan, dan alat penyimpan nilai yang stabil;
4. Mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dalam suatu cara yang adil sehingga pengembalian keuntungan bisa dijamin bagi semua pihak yang bersangkutan;
5. Memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan dari sistem perbankan syariah.

¹⁸ *Ibid.*, 89.

¹⁹ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta : Gema Insani, 2000), 2.

Karakteristik yang harus dimiliki dalam pengelolaan uang dan lembaga keuangannya tersebut tidak bisa terjadi jika hanya sektor ekonomi saja yang menjadi perhatiannya. Apapun sebuah kebijakan ekonomi yang diterapkan tanpa diiringi dan dilandasi oleh pelaku-pelakunya yang baik, maka akan menjadi sia-sia. Karakteristik ekonomi Islam dilandaskan pada ajaran Islam yang mengajarkan tentang kesatuan pandang dalam melihat semua persoalan. Oleh karenanya ekonomi Islam akan tumbuh dan berkembang bersama-sama bidang yang lainnya untuk menjadi sempurna dan mewujudkan ajaran mulianya, yakni rahmat bagi seluruh alam.

Dalam sebuah perekonomian Islam, permintaan uang akan lahir terutama dari motif transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkatan pendapatan uang dan distribusinya. Permintaan terhadap uang karena motif spekulatif pada dasarnya didorong oleh fluktuasi suku bunga pada perekonomian kapitalis. Suatu penurunan pada suku bunga dibarengi dengan harapan tentang kenaikannya akan mendorong individu dan perusahaan untuk meningkatkan jumlah uang yang dipegang. Karena suku bunga seringkali berfluktuasi pada perekonomian kapitalis, terjadilah perubahan terus menerus dalam jumlah uang yang dipegang oleh publik.

Penghapusan bunga dan kewajiban membayar zakat dengan laju 2,5 % pertahun tidak saja akan meminimalkan permintaan spekulatif terhadap uang dan mengurangi efek suku bunga, tetapi juga akan memberikan stabilitas yang lebih besar bagi permintaan total terhadap uang. Selanjutnya kebijakan dalam instrumen ini lebih jauh akan diperkuat oleh sejumlah faktor, yakni :²⁰

²⁰ *Ibid.*, 135.

1. Asset pembawa bunga tidak akan tersedia dalam sebuah perekonomian Islam, sehingga orang yang hanya memegang dana likuid menghadapi pilihan apakah tidak mau terlibat dengan resiko dan tetap memegang uangnya dalam bentuk kas atau tunai tanpa memperoleh keuntungan. Atau turut berbagi resiko dan menginvestasikan uangnya pada aset bagi hasil sehingga mendapatkan keuntungan.
2. Peluang investasi jangka pendek dan panjang dengan berbagai tingkatan resiko akan tersedia bagi para investor tanpa memandang apakah mereka adalah pengambil resiko tinggi atau rendah, sejauh resiko yang dapat diperkirakan akan diganti dengan laju keuntungan yang diharapkan.
3. Barangkali dapat diasumsikan bahwa kecuali dalam keadaan resesi tak akan ada pemegang dana yang cukup irasional untuk menyimpan sisa uangnya setelah dikurangi berbagai keperluan-keperluan transaksi dan berjaga-jaga selama ia dapat menggunakan sisanya yang menganggur untuk melakukan investasi pada aset bagi hasil untuk menggantikan paling tidak sebagian efek erosi zakat dan inflasi, sejauh dimungkinkan dalam perekonomian Islam.
4. Laju keuntungan yang berbeda dari laju suku bunga tidak akan ditentukan di depan. Satu-satunya yang akan ditentukan di depan adalah resiko bagi hasil, ini tidak akan mengalami fluktuasi, seperti halnya suku bunga karena ia akan didasarkan pada konvensi ekonomi dan sosial. Dan setiap ada perubahan di dalamnya akan terjadi lewat tekanan kekuatan-kekuatan pasar sesudah terjadi negosiasi yang cukup lama. Jika prospek ekonomi cerah, keuntungan secara otomatis akan meningkat. Karena itu tidak ada apa pun yang didapat dengan menunggu.

MASA DEPAN DUNIA ISLAM

Perekonomian Islam yang dirancang dengan meletakkan harapan terhadap keuntungan dalam sistem bagi hasil tidak mengalami fluktuasi harian atau mingguan seperti yang ada pada suku bunga. Permintaan agregat kebutuhan transaksi akan cenderung relatif stabil. Hal ini terjadi karena dalam sebuah perekonomian Islam akan ditentukan oleh nilai *output* agregat yang dampak selanjutnya distribusi pendapatan akan diperbaiki secara gradual. Namun kebijakan ini sangat bergantung pada sejauh mana komitmen pemerintah terhadap sasaran ini dan kebijakan-kebijakan lainnya untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini.

Stabilitas yang relatif lebih besar dalam permintaan uang untuk tujuan transaksi akan cenderung mendorong stabilitas yang lebih besar pula bagi kecepatan peredaran uang dalam suatu fase daur bisnis dalam sebuah perekonomian Islam. Stabilitas ini akan dapat pula diperkirakan perilakunya secara baik. Oleh karenanya, variabel yang dipakai dalam suatu kebijakan moneter yang diformulasikan dalam sebuah perekonomian Islam adalah cadangan uang (*stock of money*) daripada suku bunga.

Bank sentral Islam memiliki peran yang besar dalam sistem ekonomi Islam. Bank sentral Islam harus menjalankan kebijakan moneternya untuk menghasilkan suatu pertumbuhan dalam suatu sirkulasi uang yang dapat mencukupi dalam membiayai pertumbuhan potensial dalam *output* selama periode jangka menengah dan panjang dalam kerangka harga-harga yang stabil dan sasaran-sasaran sosio-ekonomi Islam yang lainnya. Tujuannya adalah memberikan jaminan bahwa ekspansi moneter tidak bersifat kurang mencukupi atau berlebihan, tetapi cukup untuk sepenuhnya mengeksplorasi kapasitas perekonomian agar dapat mensuplai barang-barang dan jasa-jasa bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Pentingnya mengatur pertumbuhan suplai uang untuk mengelola perekonomian secara baik, tidak berarti dengan sendirinya mengandung pengertian suatu pendekatan monetaris yang sederhana atau suatu komitmen kepada segi-segi ideologinya. Tidak ada anggapan bahwa kekuatan-kekuatan pasar yang dibiarkan sendiri akan dapat menghasilkan pertumbuhan non inflasioner, menghapuskan pengangguran, mengurangi ketidakseimbangan eksternal, dan membuat merealisasikan sasaran-sasaran lainnya yang diinginkan jika pertumbuhan dalam suplai uang secara tepat diatur.²¹

Sebenarnya harus ditekankan bahwa untuk sepenuhnya merealisasikan sasaran-sasaran Islam, tidak saja harus melakukan reformasi perekonomian dan masyarakat sejalan dengan garis-garis Islam, tetapi juga melakukan peran-peran positif pemerintah dan semua kebijakan negara termasuk fiskal, moneter, dan pendapatan yang harus berjalan seiring dan seirama. Praktik-praktik monopolistik perlu dihilangkan dan setiap usaha harus dilakukan untuk menghapuskan kekakuan struktural dan menggalakkan semua faktor yang mampu menghasilkan peningkatan penawaran barang dan jasa.

Untuk menjamin bahwa pertumbuhannya moneter mencukupi dan tidak berlebihan, perlu melakukan pengawasan secara hati-hati terhadap tiga komponen utama ekspansi moneter, yakni :²²

1. Membiaya defisit anggaran pemerintah dengan meminjam dari bank sentral;
2. Ekspansi deposito melalui penciptaan kredit pada bank-bank komersial;

²¹ *Ibid.*, 136.

²² *Ibid.*, 137.

3. Menguangkan surplus neraca pembayaran luar negeri.

Oleh karenanya strategi kebijakan moneter yang tidak saja akan membantu mengatur penawaran uang seirama dengan permintaan riil akan uang, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan untuk membiayai defisit pemerintah yang benar-benar riil dan mencapai sasaran-sasaran sosio-ekonomi masyarakat Islam lainnya. Mekanisme yang dibutuhkan tersebut adalah :²³

1. Target pertumbuhan dalam M dan Mo;
2. Saham publik terhadap depositi unjuk (Uang Giral);
3. Cadangan Wajib Resmi;
4. Pembatasan Kredit;
5. Alokasi Kredit yang Berorientasi pada Nilai. Hal ini dapat dicapai dengan menjamin bahwa :
 - a. Alokasi kredit akan menimbulkan suatu produksi dan distribusi optimal bagi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian besar anggota masyarakat.
 - b. Manfaat kredit dapat dirasakan oleh sejumlah besar kalangan bisnis dalam masyarakat
6. Teknik lain :
 - a. Membeli dan menjual saham dan sertifikat bagi hasil untuk menggantikan obligasi pemerintah dalam operasi pasar;
 - b. Rasio pemberian kembali pembiayaan;
 - c. Rasio pemberian penjamin.

Dunia muslim telah berada dalam keadaan mundur selama berabad-abad. Keruntuhan sosial dan kelemahan yang diakibatkan oleh degenerasi ini telah meratakan jalan bagi dominasi asing yang menimbulkan efek lebih jauh lagi, yakni disintegrasi dan kejatuhan. Kejatuhan ini direfleksikan

²³ *Ibid.*, 141-151.

dalam semua aspek kehidupan kaum muslimin dan dibarengi dengan kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan yang mencolok, ketidakadilan sosio-ekonomi, ketidakharmonisan sosial, dan kehilangan kreativitas. Walaupun demikian, fakta yang tidak dapat dibantah adalah bahwa kaum muslimin tetap intens diikat oleh Islam diseluruh dunia muslim dan secara tulus menggapai kelangsungan hidup dan supremasi mereka.

Terhadap persoalan ekonomi dan moneter yang menimpa di negara belahan dunia, ajaran Islam dengan ekonomi Islamnya harus mampu menyelesaikannya. Ajaran Islam mempunyai keunggulan-keunggulan ideologis yang memungkinkannya untuk menawarkan cetak biru bagi suatu pemecahan yang adil dan dapat berjalan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh seluruh umat manusia. Meskipun untuk itu perlu adanya kemauan politik dalam menerapkan ajaran-ajarannya sekaligus kesediaan untuk melaksanakan pembaharuan-pembaharuannya.

Oleh karena perekonomian masyarakat Islam masih dalam tahap pembentukan, tentunya tidak terlalu sulit bagi Negara-negara tersebut untuk menerima rancangan baru bagi perekonomian mereka dan sistem moneter mereka. Meskipun demikian, setelah berjalan beberapa waktu, mungkin tambah sukar bagi mereka untuk menerapkan pembaharuan-pembaharuan yang dikehendaki oleh Islam. Sejumlah langkah perlu diambil di samping reformasi sosio-ekonomi masyarakat muslim untuk memungkinkan transformasi sistem keuangan dan perbankan menuju sistem Islam. Langkah-langkah yang diambil adalah :²⁴

1. Bunga harus diharamkan, dengan memberikan periode keringanan (*grace periode*) hingga sesudah itu bunga harus

²⁴ *Ibid.*, 170-174.

- dipandang sebagai suatu kejahatan, dan sesudah masa kadaluwarsa harus ditiadakan dari transaksi domestik;
2. Rasio pinjaman/ekuitas di negara-negara muslim harus ditingkatkan secara substansial untuk mengubah sifat basis pinjaman dalam ekonomi. Semua pelaku usaha bisnis harus dituntut untuk meningkatkan secara gradual proporsi ekuitas dari total pembiayaan mereka dan mengurangi ketergantungannya pada pinjaman sehingga seluruh kebutuhan modal kerja dan modal tetap, dapat dipenuhi lewat ekuitas;
 3. Reformasi sistem pajak harus dapat mempercepat proses ini. Suatu sistem pajak yang irasional akan mendorong keuntungan yang diterima secara baik ke dalam uang gelap (*black money*), yang bukannya dipergunakan untuk tujuan-tujuan produktif melalui ekuitas dan cadangan, malahan dipergunakan untuk *capital flight* dan konsumsi mubadzir yang dilarang oleh Islam;
 4. Gerakan perekonomian yang luas akan meningkatkan ekuitas dan membantu memobilisasi dana nganggur dengan menyediakan kepada para investor, terutama kepada para investor yang menghindari riba. Peluang-peluang menggunakan tabungannya untuk tujuan-tujuan produktif, akan berdampak menyebarkan kepemilikan bisnis dalam masyarakat dan mengurangi konsentrasi kekayaan. Akan tetapi, langkah ini harus dibarengi dengan langkah reformatif terhadap bursa saham seiring dengan ajaran Islam. Yang tidak membolehkan motif spekulatif sedemikian rupa sehingga nilai-nilai saham berubah secara rasional seperti didiktekan oleh faktor-faktor ekonomi dan tidak bersifat *erratic* karena dibayangi oleh kekuatan spekulatif irasional
 5. Semua proyek pemerintah yang layak dilakukan penentuan harga komersial dan karenanya layak dijalankan dengan prinsip bagi hasil, harus dikonversikan kepada

- prinsip bagi hasil untuk mengurangi beban pada perbendaharaan publik.
6. Bunga harus dihapuskan dari lembaga kredit khusus yang disponsori pemerintah yang beroperasi dalam berbagai sektor ekonomi.
 7. Semua lembaga keuangan yang berorientasi kepada bunga harus dikonversikan secara gradual, tanpa memandang apa apakah mereka domestik atau milik asing. Menjadi lembaga yang berbasis bagi hasil.
 8. Pendirian sejumlah lembaga finansial tambahan harus dicanangkan untuk mempermudah penempatan dana sektor swasta dan juga mendukung operasi bank komersial.

Untuk mewujudkan langkah-langkah tersebut tidak diperboehkan memaksakan realisasi target secara instan. Proses konversi menuntut bukan saja pengalaman dari pihak lembaga keuangan dan pelaku bisnis, tetapi juga pemecahan persoalan-persoalan teknis dan penyesuaian yang tidak terduga yang diperkirakan ada selama konversi. Lebih baik berjalan lambat, tetapi terus daripada tergesa-gesa, tetapi tidak berhasil. Perlu disadari bahwa keberhasilan usaha akan memperlihatkan kekuatan prinsip Islam, sedangkan setiap kegagalan akan hanya merugikan reputasi Islam.

PENUTUP

Kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam adalah bagian dari ajaran Islam secara keseluruhan. Ajaran Islam menjadi acuan pokok dalam menentukan berbagai macam kebijakan moneter dalam suatu negara. Oleh karenanya terlaksananya kebijakan moneter dalam ekonomi Islam akan dan harus didukung oleh berbagai bidang-bidang yang lain yang sama-sama mengacu kepada inti ajaran Islam itu sendiri. Pada akhirnya kebijakan ekonomi moneter akan menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita ekonomi Islam dan ajaran Islam itu sendiri yakni sebagai ratmat bagi seluruh alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, Agung. "IMF Gagal Cegah Perang Mata Uang" dalam *Republika* (11 Oktober 2010).
- Boediono. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 1990.
- Chapra, M. Umer. *Sistem Moneter Islam*, Jakarta : Gema Insani, 2000.
- Fakih, Mansour. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta : Insist Press dan Pustaka Pelajar, 2003.
- Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Mulyano. *Argumentasi Sains atas Bahaya Riba*. Bandung : Syamil Cipta Media, 2002.
- Mubarok, Jaih. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muhammad. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta : Salemba Empat, 2002.
- Nafik HR, Muhammad. *Benarkah Bunga Haram, Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil & Dampaknya pada Perekonomian*. Surabaya : Amanah, 2009.
- Prasetyantoko, A. *Arsitektur Baru Ekonomi Global Belajar dari Keruntuhan Ekonomi Asia Tenggara*. Jakarta : Elex Media Komputindo, 2010.
- Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2000.
- Saefuddin, Ahmad Muflih. *Regionalisasi Mata Uang Dinar dalam Dinar Emas Solusi Krisis Moneter*. Jakarta : PIRAC,

SEM Institute, Infid, 2001.

Samuelson, Paul A. dan Williams D. Nordaus. *Ekonomi*, Jilid I, terj. Jaka Wasana. Jakarta : Penerbit Erlangga, 1989.